

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Luas laut Indonesia berpotensi untuk pengembangan perikanan laut. Untuk itu perlu didukung oleh ketersediaan pelabuhan perikanan yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Pelabuhan perikanan merupakan komponen penting dalam pengembangan industri perikanan. Pelabuhan perikanan merupakan simpul penting yang menjadi penghubung antara kegiatan penangkapan ikan di laut dengan kegiatan pengolahan dan pemasaran yang dilakukan di darat. Pembangunan pelabuhan perikanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan infrastruktur perikanan dan bagian dari sistem perikanan tangkap. Adanya pelabuhan perikanan akan mendorong aktivitas perikanan tangkap lebih teratur dan terarah. Hakekatnya pelabuhan perikanan merupakan kawasan pengembangan industri perikanan. Pembangunan pelabuhan perikanan di suatu daerah merupakan embrio pembangunan perekonomian di suatu daerah. Pelabuhan perikanan diperlukan dalam rangka menunjang usaha motorisasi serta pengembangan ekonomi perikanan secara menyeluruh terutama menunjang perkembangan industri perikanan baik hulu maupun hilir, sehingga diharapkan akan tercapai pemanfaatan sumberdaya perikanan yang seimbang, merata dan proposional **Yuspardianto, (2015)**.

Pelabuhan perikanan memiliki peranan strategis dalam pengembangan perikanan dan kelautan, yaitu sebagai pusat atau sentral kegiatan perikanan laut. Pelabuhan perikanan selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna-pengguna hasil tangkapan, baik pengguna langsung maupun tidak

langsung seperti: pedagang, pabrik pengolah, restoran dan lain-lain, juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat di sekitar pelabuhan perikanan **Kusyanto et al, (2006)**.

Pada tahun 1975/1976 Pelabuhan Perikanan Karangantu mulai dibangun diatas tanah seluas 2,5 Ha bertempat di desa Banten Kecamatan Kasemen dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 311/Kpts/Org/5/1978 tanggal 25 Mei 1978 secara resmi beroperasi dan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan nama Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Karangantu. Seiring dengan berkembang dan meningkatkannya kegiatan operasional pelabuhan maka pada tanggal 30 Desember 2010 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan yang didahului dengan dikeluarkannya Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 2 Desember 2010 Nomor : 3677/M.PAN-RB/12/2010 tentang Usulan Penataan UPT di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga pada tanggal 30 Desember 2010 tersebut, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Karangantu resmi berganti nama dan meningkat kelasnya menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu **PPN Karangantu, (2018)**.

Seiring dengan peningkatan status PPN Karangantu, dapat dikatakan bahwa peran PPN Karangantu sebagai pusat pengembangan usaha perikanan dan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan dapat ditingkatkan. Salah satunya

yang dapat menunjang hal tersebut adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Keberhasilan pengembangan sektor perikanan tidak terlepas dari dukungan prasarana pendukungnya dimana dalam hal ini adalah pelabuhan perikanan, yang merupakan *interface* (penghubung) antara aktifitas perikanan di laut (penangkapan) dengan aktifitas perikanan di darat (pengolahan dan pemasaran). Pelabuhan perikanan merupakan pusat segala aktivitas yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan dan usaha penyediaan bahan perbekalan, perbengkelan, pengelolaan hasil tangkapan dan lain-lain **Lubis dalam Yuspardianto, (2015).**

Hal ini dapat dilihat secara nyata bahwa keberhasilan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan dapat menimbulkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pelabuhan perikanan dapat memajukan ekonomi disuatu wilayah dan sekaligus dapat meningkatkan penerimaan Negara dan pendapatan daerah (**Yuspardianto, 2015**). Sementara di PPN Karangantu ini diduga masih memiliki permasalahan pembangunan, seperti belum adanya peningkatan ketersediaan fasilitas yang memadai karena masih adanya keterbatasan fasilitas yang tersedia, dan banyaknya fasilitas yang rusak dan tidak terkelolanya fasilitas dengan baik di PPN Karangantu.

Keterbatasan fasilitas yang tersedia di PPN Karangantu seperti sempitnya lahan pelabuhan, dermaga yang masih terbatas, dan kedalaman kolam pelabuhan yang belum sesuai dengan peraturan diduga dapat menjadi penghambat kelancaran operasional PPN Karangantu. Selain keterbatasan lahan untuk pengembangan industri pengolahan ikan, proses pemasaran ikan hasil tangkapan di PPN Karangantu juga tidak menguntungkan bagi nelayan. Proses pemasaran di

PPN Karangantu tidak melalui mekanisme pasar yang menguntungkan, baik bagi nelayan maupun pedagang yaitu dengan tidak adanya pelelangan ikan. Pelelangan ikan adalah kegiatan awal dari sistem pemasaran ikan di pelabuhan perikanan untuk mendapatkan harga yang layak, khususnya bagi nelayan **Lubis dalam Yuspardianto, (2015).**

Strategi pengembangan diperlukan agar PPN Karangantu memiliki arah yang jelas dalam mencapai sasaran yang diinginkan. Strategi pengembangan yang tepat akan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap berbagai aktivitas yang ada di dalam lingkungan PPN Karangantu. Strategi pengembangan yang tepat harus memperhitungkan potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang ada dalam rangka memberikan kenyamanan teknis dan operasional terbaik bagi nelayan dan pengguna lainnya.

Berbagai masalah yang teridentifikasi di atas, masyarakat pentingnya penanggulangan masalah dalam rangka optimalisasi peran PPN Karangantu. Pengembangan pelabuhan adalah hasil komitmen bersama dari berbagai pihak untuk menjadikan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. Hal ini juga membuktikan tentang pentingnya kajian strategis bagi pengembangan PPN Karangantu. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian tentang “Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Kota Serang Provinsi Banten” menjadi penting untuk dilakukan, terutama dengan kegiatan operasional pelabuhan untuk pengembangan termasuk penata dan implementasi pembangunan segenap keberadaan fasilitas agar dapat menjamin pelaksanaan kegiatan di PPN Karangantu. Kondisi ini diharapkan mendorong pihak pemerintah agar

memfokuskan melengkapi fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk mempermudah kinerja pengawai maupun nelayan yang berada di sekitar kawasan pelabuhan perikanan nusantara (PPN) Karangantu.

1.2 Tujuan

Penelitian tentang strategi pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu bertujuan untuk:

1. Menganalisis kapasitas dan ketersediaan fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang di PPN Karangantu
2. Mendeskripsikan tata kelola fasilitas dan merumuskan strategi pengembangan PPN Karangantu

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai informasi bagi instansi-instansi terkait dan pengguna lainnya untuk rencana pengembangan pelabuhan di masa yang akan mendatang.